

PENGUMUMAN TENDER
No.27/12/DMAP-GPPU-PPPU/PENG/B tanggal 21 Juli 2025

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja di Kantor Pusat Bank Indonesia Tahun 2025 - 2027**, dengan nomor pengadaan RFQ: 47837 melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan secara umum yaitu penyediaan jasa pekerja di Kantor Pusat Bank Indonesia, yang meliputi Pendistribusian Dokumen dan Layanan Umum (*Messenger*), Asistensi Analis dan Kesekretariatan BSBI, Pengemudi, Layanan terhadap Anggota Dewan Gubernur (*Pantry DG*), *General Administrator* dan Asistensi Pengolahan Data (*Asisten Data Processor*) dan pendukung lainnya.
- II. Pagu anggaran sebesar Rp306.601.524.674,64 sudah termasuk PPN 12% dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Perusahaan adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>).
2. Perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan perundang-undangan.
3. Perusahaan merupakan badan usaha berdomisili di Indonesia yang bergerak dalam pemborongan pekerjaan dan/atau penyedia jasa tenaga kerja yang dibuktikan dengan sertifikat KADIN pada minimal satu bidang sebagai berikut:

Klasifikasi	Kualifikasi
5.07.12 (Penyedia Tenaga Kerja)	Besar
5.07.12.01 (Penyedia Tenaga Kerja Lokal)	Besar

4. Perusahaan dalam periode 2019-2024 pernah atau sedang melaksanakan pekerjaan sebagai penyedia jasa pekerja dengan jumlah tenaga kerja minimal 700 orang dan nilai kontrak minimal Rp50 miliar dalam satu kontrak.
 5. Perusahaan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam memberikan layanan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau penyedia jasa pekerja pada perusahaan besar setempat.
 6. Perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam melakukan pengelolaan Tenaga Kerja *Outsourcing* (TKO) yang dibuktikan dengan saldo kas dan setara kas akhir tahun pada laporan keuangan tahunan, minimal senilai dengan total gaji bulanan dan biaya lainnya, atau senilai Rp10 Miliar.
 7. Apabila calon peserta pernah bekerja sama dengan Bank Indonesia, maka calon peserta dimaksud harus memiliki riwayat kinerja yang baik selama bekerja sama dengan Bank Indonesia pada periode 2018 – 2025.
 8. Perusahaan memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di instansi ketenagakerjaan setempat.
 9. Perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024.
 10. Persyaratan lainnya:
 - a. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;
 - e. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - f. Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang manajemen SDM, hubungan industrial, dan hukum ketenagakerjaan yang telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - g. Pengurus perusahaan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau anggota TNI & POLRI.
- IV. Pendaftaran calon peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran ditetapkan mulai tanggal **22 s.d. 29 Juli 2025**, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon peserta Tender **dengan cara mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk link)** ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri atas:
1. Scan surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin/Penanggung Jawab perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan);
 2. Scan sertifikat KADIN pada salah satu bidang yaitu 5.07.12 (Penyedia Tenaga Kerja) – Klasifikasi Besar atau 5.07.12.01 (Penyedia Tenaga Kerja Lokal) – Klasifikasi Besar sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.3. Apabila sertifikat KADIN telah habis masa berlakunya maka dapat menyampaikan sertifikat tersebut dengan menyertakan surat keterangan dalam proses pengurusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 3. Scan Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Dokumen Pendukung sejenis lainnya yang membuktikan perusahaan dalam periode 2019-2024 pernah atau sedang melaksanakan pekerjaan sebagai penyedia jasa pekerja dengan jumlah tenaga kerja minimal 700 orang dan nilai kontrak minimal Rp50 miliar dalam satu kontrak sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.4. Dalam hal pada Kontrak tidak terdapat angka yang menunjukkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai kontrak maka dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan angka tersebut.
 4. Scan Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Dokumen Pendukung sejenis lainnya yang membuktikan perusahaan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam memberikan layanan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau penyedia jasa pekerja pada perusahaan besar setempat sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.5. Adapun kriteria perusahaan besar setempat adalah sebagaimana persyaratan butir III.4, sedangkan maksud dari setempat adalah penyedia jasa memberikan jasa pada perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan dalam konteks ini mencakup badan usaha, instansi pemerintah, lembaga, maupun entitas lain yang berwenang sebagai pengguna jasa.
 5. Scan Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian lengkap dengan laporan neraca keuangan saldo kas dan setara kas akhir tahun minimal sebesar Rp10 Miliar atau setara dengan total gaji bulanan dan biaya lainnya minimal sebesar Rp10 Miliar sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.6. Apabila laporan Keuangan *audited* tahun 2024 belum tersedia maka dapat menyampaikan Laporan Keuangan *non audited* tahun 2024 dengan menyertakan surat keterangan dalam proses audit oleh KAP yang dikeluarkan atau divalidasi oleh KAP untuk Laporan Keuangan tahun 2024.
 6. Scan bukti wajib lapor ketenagakerjaan di instansi ketenagakerjaan setempat minimal lapor tahun 2024 sebagaimana butir III.8.
 7. Scan bukti pembayaran pajak badan usaha tahun 2024 sebagaimana butir III.9.
 8. Scan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan bahwa:
 - a. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

- d. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;
 - e. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - f. Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang manajemen SDM, hubungan industrial, dan hukum ketenagakerjaan yang telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - g. Pengurus perusahaan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau anggota TNI & POLRI.
- Seluruh pernyataan a. s.d g. di atas dinyatakan dalam 1 (satu) Surat Pernyataan. Dalam hal surat pernyataan terdapat ketidaklengkapan meterai, dapat menyampaikan susulan ketidaklengkapan dimaksud.
- V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara lengkap (tidak dalam bentuk *link*) serta memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi *E-Procurement*, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Pengadaan selanjutnya.
 - VI. Dalam hal calon peserta Tender mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas helpdesk *E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.
 - VII. Pelaksanaan Tender ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.



PANITIA TENDER



KOP PERUSAHAAN
SURAT PERMOHONAN

No. / /

Kepada :

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA

Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Tender Pengadaan

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penangguang Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta Tender Pengadaan

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa Peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses tender berikutnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penangguang
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Dalam rangka mengikuti Tender, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;
5. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
6. Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang manajemen SDM, hubungan industrial, dan hukum ketenagakerjaan yang telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun; dan
7. Pengurus perusahaan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau anggota TNI & POLRI.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta,
Yang menyatakan,

Meterai
Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.